

PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Karina Wini Pratiwi J. Gugere

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIE Mahardhika Surabaya

Email : karinawinip@gmail.com

ABSTRACT

The amount of budget allocated for each implementation of government activities that often include leakage of funds, waste, and inefficiencies in their implementation. This research aims to measure financial performance using the concept of Value For Money which is measured in terms of economy, efficiency, and effectiveness. The object of the research in this study is Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah which in the implementation of its activities focuses on improving the welfare of the community, especially farmers and ranchers in Central Sulawesi. This study uses qualitative descriptive methods using data on realization report of revenue and expenditure budgets of Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah in the 2019-2020 budget year. The results of the study showed that financial performance in the economic ratio in 2019-2020 is in the range of 90%-100% which can be said to be less economical in 2019-2020 is in the range above 100% which can be said to be inefficient. The effectiveness ratio in 2019-2020 is in the range above 100% which can be said to be very effective.

Keywords: Performance, Financial, Money

PENDAHULUAN

Pemerintah dan organisasi sektor publik seringkali menjadi sorotan masyarakat khususnya dalam hal kinerja. Organisasi sektor publik yang dalam pelaksanaan kegiatannya mendapat alokasi anggaran yang cukup besar. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan besar bagi masyarakat, apakah kinerja organisasi sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, bagaimana organisasi mengelola anggaran tersebut agar anggaran dapat terealisasi dengan baik, dan apakah kinerja organisasi sektor publik terlaksana secara efisien dan efektif. Kinerja organisasi sektor publik tidak hanya dapat dilihat dengan hasil kerjanya saja, melainkan juga harus melihat dan mempertimbangkan kinerja dari segi keuangan itu sendiri.

Pengukuran kinerja keuangan menjadi salah satu usaha bagi suatu organisasi untuk melihat pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kredibilitas suatu organisasi akan tergambarkan melalui pengukuran kinerja. Selain itu, pengukuran kinerja juga dapat menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Kinerja keuangan merupakan kemampuan yang dimiliki suatu organisasi untuk menilai seberapa efektif dan efisien dalam penggunaan suatu modal (Munawir, 2011:50).

Pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar kepada organisasi perangkat daerah untuk setiap pelaksanaan kegiatan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga organisasi perangkat daerah seringkali disoroti dalam hal kinerja. Apakah anggaran yang dikeluarkan pemerintah terealisasi dengan baik atau tidak. Masyarakat akan melihat tidak hanya dari hasil kerja yang terlihat melainkan juga akan menuntut terhadap pengelolaan anggaran tersebut. Hal ini dikarenakan, seringkali terjadi kebocoran dana,

pemborosan, dan bahkan inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan untuk dapat menilai penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran kinerja yang dapat digunakan oleh organisasi sektor publik yaitu konsep *Value For Money*. Konsep ini akan memusatkan pengukuran pada tiga aspek, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu program kegiatan. Konsep ini dapat menggambarkan bagi masyarakat apakah penggunaan dana anggaran dapat menghasilkan suatu nilai-nilai tertentu atau tidak. Konsep ini akan meninjau baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Penggunaan konsep ini, dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan kesadaran mengenai penggunaan uang publik sebagai anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah untuk memberikan akuntabilitas publik, serta dapat memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat secara ekonomis dan efisien.

Pengukuran kinerja dengan penggunaan konsep *Value For Money* akan mengukur dalam hal *input*, *output* dan *outcome*. Pengukuran dari sisi ekonomis, akan mengukur perbandingan antara *input* dan *input value*. Dimana pada pengukuran ini perolehan *input* dengan harga terendah untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Pengukuran dari sisi efisiensi akan mengukur perbandingan antara *output* dan *input*. Dimana pada pengukuran ini akan membahas pencapaian hasil dengan penggunaan *input* yang rendah. Pengukuran dari sisi efektivitas akan mengukur perbandingan antara *outcome* dan *output*. Dimana pada pengukuran ini akan membahas bagaimana pencapaian hasil dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Kinerja organisasi sektor publik semakin menjadi sorotan seiring dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dan cara berpikir yang semakin kritis, sehingga menjadikan organisasi sektor publik harus dapat memberikan hasil yang

baik dalam pelaksanaan kegiatan untuk dapat mengurangi kebocoran dana, pemborosan dan juga inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan akuntabilitas publik.

Tuntutan masyarakat untuk dapat melihat kinerja organisasi sektor publik dalam pengelolaan anggaran, dengan harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Kinerja keuangan menjadi salah satu hal yang penting untuk dikaji dan diukur untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik. Organisasi perangkat daerah yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah untuk dapat mencapai tujuan dan target sasaran yang diinginkan pemerintah daerah harus dapat memenuhi pencapaian hasil yang baik, baik dari segi pelaksanaan kegiatan fisik maupun dari pengelolaan anggaran. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintah diharapkan dapat terealisasi dengan baik dan digunakan pada program kegiatan yang menjadi prioritas organisasi untuk dapat memperoleh dan memberikan manfaat dalam pencapaian hasil. Masyarakat yang menginginkan penggunaan anggaran terhadap sumber daya dapat dilakukan secara hemat dalam hal pengadaan alokasi, sehingga dapat meminimalkan dalam hal penggunaannya yang akan tetap mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan dan target sasaran.

Dengan demikian penelitian ini, akan membahas penerapan konsep *Value For Money* dalam mengukur kinerja keuangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui kinerja keuangan dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan menggunakan konsep *Value For Money*.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Kinerja ialah suatu hasil yang dicapai dalam pelaksanaan aktivitas kerja

yang bertujuan untuk memperoleh target maupun sasaran serta visi dan misi suatu organisasi. Tanpa tujuan dan indikator target sasaran, tidak ada cara untuk dapat mengetahui kinerja individu atau organisasi dikarenakan tidak adanya tolok ukur. Kinerja harus bisa diukur dan dipertanggung jawabkan berupa laporan kinerja. Keuangan merupakan istilah yang biasa digunakan berkaitan dengan manajemen dan studi tentang uang maupun investasi. Menurut Sartono (2011:50) keuangan merupakan sebuah manajemen yang terkait dalam hal pembiayaan investasi sebagai bentuk pengalokasian dana.

Kinerja keuangan yaitu gambaran pencapaian kesuksesan organisasi atas kegiatan atau aktivitas kerja yang telah diselenggarakan. Kinerja keuangan dapat menggambarkan suatu pelaksanaan keuangan sudah terlaksana dengan tepat (Fahmi, 2012:2). Kinerja keuangan adalah sebuah keputusan yang dilakukan secara berkala sehingga menggambarkan kesuksesan pekerjaan dalam mencapai tujuan suatu organisasi yang didasarkan pada kriteria, sasaran, dan tolok ukur yang telah ditentukan (Mulyadi, 2007:2). Sehingga, kinerja keuangan adalah gambaran atas pencapaian keberhasilan yang diperoleh suatu organisasi dalam penyelenggaraan aktivitas sesuai dengan standar, sasaran dan kriteria yang telah menjadi ketentuan.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Sistem pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik merupakan suatu sistem yang digunakan dalam mengukur kinerja baik finansial maupun non-finansial untuk membantu pejabat sektor publik dalam melakukan evaluasi implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2002). Pengukuran kinerja keuangan bertujuan, sebagai berikut:

1. Adanya perbaikan terhadap kinerja kedepannya agar lebih baik dan terorganisir dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sektor publik.

2. Sebagai sarana dalam pengambilan keputusan untuk mengubah kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan.
3. Dapat bertanggung jawab kepada publik.
4. Pimpinan dan staf dapat berkomunikasi mengenai strategi dengan lebih baik.
5. Pengalokasian sumber daya dengan baik.
6. Kemajuan pencapaian strategi kerja dapat dilacak dengan adanya keseimbangan dalam pengukuran kinerja secara finansial dan non-finansial.
7. Akuntabilitas terhadap publik dapat tercapai dengan adanya pengukuran kinerja.

Peran Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja dapat berfungsi sebagai indeks dalam implementasi taktik yang sudah ditentukan. Indikator tersebut dapat berupa hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan utama suatu organisasi (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*). Fokus utama dalam mengukur kinerja pada suatu entitas pemerintah adalah untuk mengimplementasikan konsep *Value For Money*. *Value For Money* mempunyai tiga elemen, yaitu ekonomi, efisien, dan efektif. Untuk dapat mengukur ketiga komponen tersebut, perlu diketahui tingkat *input*, *output*, dan *outcome* oleh organisasi pemerintahan. Menurut Mahmudi (2007:89) bahwa indikator kinerja yang akan diuraikan seharusnya memiliki karakteristik, sebagai berikut:

1. Bisa dipahami dan simpel,
2. Bisa diukur,
3. Bisa dinyatakan dalam angka,
4. Barometer atau target kinerja berhubungan,
5. Efisiensi, pelayanan terhadap pelanggan, dan kualitas menjadi titik fokus,

6. Dapat dilakukan pengkajian dengan teratur.

Sistem Pengukuran Kinerja

Suatu skema yang memiliki tujuan dalam membantu pejabat publik untuk mengevaluasi keberhasilan suatu rencana dengan menggunakan alat pengukuran keuangan dan non-keuangan disebut sistem pengukuran kinerja. Pembentukan sistem evaluasi global dilakukan dalam rangka memaksimalkan keuntungan atau profit dalam jangka panjang.

1. Perencanaan strategis, yaitu suatu proses terencana yang bertujuan untuk dapat memperoleh respon dan ketentuan-ketentuan dasar sebagai panduan dan pedoman organisasi atau kelompok dalam memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang perlu dilaksanakan dan mengapa melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Penyusunan program, yaitu suatu proses dalam menentukan putusan tentang program kegiatan yang akan dikerjakan suatu kelompok dan besaran sumber daya yang ditaksir akan didistribusikan pada setiap program kegiatan tersebut.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran yaitu suatu rancangan keuangan di masa yang akan datang meliputi keinginan suatu manajemen dalam pendapatan, pengeluaran, dan transaksi lainnya dalam periode satu tahun. Anggaran sektor publik menjadi salah satu hal yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan anggaran yang sudah dibuat akan menjadi sarana dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat perencanaan, pemerintah dapat membuat rencana dalam melakukan tindakan, merencanakan besaran biaya yang harus dikeluarkan, dan perolehan hasil dari belanja pemerintah.

2. Sebagai alat pengendalian, anggaran dapat membatasi dan menghindari timbulnya kelebihan dalam pengeluaran, kekurangan pengeluaran, dan salah dalam penempatan pengeluaran berupa pengalokasian dana/anggaran ke tempat yang tidak menjadi prioritas dalam pengeluaran anggaran.
3. Sebagai alat kebijakan fiskal, dapat membantu mendukung perekonomian dan menjaga kestabilan ekonomi.
4. Sebagai alat politik, sebagai bentuk kewajiban penggunaan sumber daya politik untuk kepentingan khusus lembaga eksekutif dan legislatif sebagai bentuk komitmen dalam menggunakan dana politik, sehingga implementasi anggaran yang sudah disetujui gagal, akan menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah dapat menurun.
5. Sebagai alat komunikasi dan koordinasi antara beberapa unit kerja di lingkungan pemerintahan. Hal ini memungkinkan untuk dapat melakukan identifikasi inkonsistensi dalam unit kerja untuk memperoleh target yang sudah ditentukan sejalan dengan penggunaan anggaran yang baik dan tepat.
6. Sebagai alat evaluasi kinerja, dikarenakan anggaran merupakan suatu bentuk kewajiban administratif lembaga eksekutif kepada otoritas legislatif sebagai pemberi wewenang dalam pemerintahan, maka kinerja pemerintah dapat dievaluasi berdasarkan efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian target penggunaan anggaran.
7. Sebagai alat motivasi, untuk dapat memberikan motivasi kepada para manajer dan karyawannya dalam melakukan pekerjaan, agar dapat dilakukan secara ekonomi, efisien, dan efektif dalam pencapaian tujuan

dan target sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi.

8. Anggaran sebagai sarana dalam memberikan ruang publik yang berperan sebagai saran bagi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi sosial lainnya untuk dapat melakukan pengawasan terhadap rencana keuangan pemerintah sehingga masyarakat dapat mengekspresikan suara dan pendapat mereka.

Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran operasional, dipergunakan dalam merencanakan kebutuhan rutin pada pelaksanaan program pemerintahan, seperti dana untuk pengeluaran/belanja rutin organisasi. Biaya ini tidak dapat menambah aset atau kekayaan dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Yang termasuk dalam anggaran operasional, yaitu belanja administrasi umum, dan belanja operasi dan pemeliharaan.
2. Anggaran modal/investasi, yaitu anggaran yang menggambarkan suatu perencanaan jangka panjang dan pengeluaran jangka panjang atas aset tetap, seperti kendaraan, bangunan, peralatan, dan sebagainya. Anggaran ini memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dapat menambah aset atau kekayaan pemerintah, seperti belanja modal/investasi atau belanja pembangunan.

Konsep Value For Money

Value For Money menjadi salah satu konsep yang didasarkan pada 3 kepentingan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang digunakan dalam manajemen organisasi sektor publik. Dalam mengukur kinerja keuangan pada organisasi sektor publik *Value For Money* menjadi fokus utama, dimana informasi

mengenai anggaran belanja akan mempengaruhi hasil tertentu bagi masyarakat berdasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif. Pengukuran kinerja dengan konsep *Value For Money* dapat menjelaskan mengenai informasi yang mencirikan fungsi-fungsi kontrol dan mengedepankan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi akuntabilitas. Oleh sebab itu, konsep ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik.

Menurut Mardiasmo (2002:130) *Value For Money* adalah sebuah konsep dalam manajemen entitas pemerintah yang berdasarkan pada 3 faktor, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah ukuran yang relatif berdasarkan perolehan nilai *input* pada harga terendah dalam memperoleh kualitas terbaik. Ekonomis adalah perbandingan antara *input* dengan *input value*. Efisiensi merupakan konsep produktivitas berdasarkan pada pencapaian kinerja (*output*) maksimum pada nilai *input* tertentu dengan meminimalkan penggunaan *input* untuk memperoleh *output* tertentu. Efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input* berdasarkan kriteria kinerja atau tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan atau target kebijakan sesuai dengan tingginya capaian keberhasilan suatu pekerjaan kegiatan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah perbandingan antaran *outcome* dengan *output*.

Pengukuran Value For Money

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan konsep *Value For Money* perlu diketahui terlebih dahulu tingkat *input*, *output* dan *outcome* agar dapat mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tahapan pertama yaitu dengan menentukan *input*, *output*, dan *outcome* yang berkaitan pada visi, misi, dan tujuan suatu organisasi.

1. *Input*, yaitu penggunaan sumber daya dalam melaksanakan suatu program, kebijakan, dan aktivitas.
2. *Output*, yaitu pencapaian hasil dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan kebijakan. Pengukuran *output* dapat menggambarkan hasil pelaksanaan dari suatu kegiatan.
3. *Outcome*, merupakan timbulnya suatu dampak yang disebabkan oleh pelaksanaan suatu program dan kebijakan. *Outcome* biasanya dikaitkan dengan target atau sasaran yang akan dicapai suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan satu atau lebih peristiwa yang terjadi secara sistematis dan akurat. Penggunaan metode deskriptif kualitatif, dapat menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu laporan realisasi anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019-2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, studi pustaka dan juga dokumentasi.

Penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada tiga elemen, yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

- a) Rasio ekonomis
Rasio ini merupakan akan mengukur perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
Rasio Ekonomis =

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian:

Apabila kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan tidak ekonomis, 90%-100% dikatakan kurang ekonomis, 80%-90% dikatakan cukup ekonomis, 60%-80% dikatakan ekonomis, dan dibawah 60% dikatakan sangat ekonomis (Abdul Halim, 2007).

- b) Rasio Efisiensi
Rasio ini merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai melalui suatu program kegiatan dan aktivitas dengan realisasi anggaran.

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian:

Apabila kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% dikatakan kurang efisien, 80%-90% dikatakan cukup efisien, 60%-80% dikatakan efisien, dan dibawah 60% dikatakan sangat efisien (Abdul Halim, 2007).

- c) Rasio Efektivitas
Rasio ini menggambarkan suatu hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan sasaran atau target yang telah ditentukan.

Rasio Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian:

Apabila kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90%-100% dikatakan efektif, 80%-90% dikatakan cukup efektif, 60%-80% dikatakan kurang efektif, dan dibawah

60% dikatakan tidak efektif (Abdul Halim, 2007).

HASIL PENELITIAN

Data Penelitian

Berikut ini adalah data penelitian yang digunakan. Data ini merupakan data keuangan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019-2020.

Tabel 1. Data Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019-2020.

Uraian	2019	2020
Anggaran Penerimaan PAD	500.000.000,00	850.000.000,00
Realisasi Penerimaan PAD	1.026.282.900,00	1.098.788.000,00
Anggaran Belanja	106.244.657.861,46	71.349.816.400,95
Realisasi Anggaran Belanja	102.214.045.668,00	69.505.287.226,00
Anggaran Belanja Langsung	79.664.473.224,00	45.544.235.126,25
Realisasi Anggaran Belanja Langsung	77.437.868.397,00	45.387.868.369,00

Sumber: Data Diolah

Tabel 1 menunjukkan data keuangan terkait anggaran penerimaan PAD dan belanja serta realisasinya di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019-2020.

Uji Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis merupakan perbandingan antara input dan input value

yang dinyatakan dengan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasinya. Rasio ini untuk mengetahui apakah sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan telah dikeluarkan secara optimal. Kinerja keuangan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap penggunaan sumber daya.

Tabel 2. Rasio Ekonomis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019-2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Ekonomis
2019	102.214.045.668,00	106.244.657.861,46	96,21%
2020	69.505.287.226,00	71.349.816.400,95	97,41%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel rasio ekonomis diatas, dapat diketahui kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan konsep

Value For Money. Hasil uji rasio ekonomis menunjukkan bahwa:

- Pada tahun anggaran 2019 rasio ekonomis mencapai 96,21% atau realisasi anggaran belanja sebesar Rp

102.214.045.668,00 dari anggaran belanja sebesar Rp 106.244.657.861,46. Rasio ini berada pada rentang 90%-100% yang dapat dikatakan kurang ekonomis.

- b. Pada tahun anggaran 2020 rasio ekonomis mencapai 97,41% atau realisasi anggaran belanja sebesar Rp 69.505.287.226,00 dari anggaran belanja sebesar Rp 71.349.816.400,95. Rasio ini berada pada rentang 90%-100% yang dapat dikatakan kurang ekonomis. Pada tahun 2020 rasio ekonomis mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,2% meskipun nilai

anggaran yang ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Uji Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yang dinyatakan dengan melakukan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi penerimaan PAD. Pada rasio efisiensi dapat diketahui apakah penggunaan sumber daya terhadap hasil kegiatan sudah dilakukan secara efisien. Dimana hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang rendah.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019-2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi
2019	77.437.868.397,00	1.026.282.900,00	7545,47%
2020	45.387.868.389,00	1.098.788.000,00	4130,72%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel rasio efisiensi diatas, dapat diketahui kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan konsep *Value For Money*. Hasil uji rasio efisiensi menunjukkan bahwa:

- a. Pada tahun anggaran 2019 rasio efisiensi mencapai 7545,47% atau realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 77.347.868.397,00 dari realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 1.026.282.900,00. Rasio ini berada pada rentang lebih dari 100% yang dapat dikatakan tidak efisien.
- b. Pada tahun anggaran 2020 rasio efisiensi mencapai 4130,72% atau realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 45.387.868.389,00 dari

realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 1.098.788.000,00. Rasio ini berada pada rentang lebih dari 100% yang dapat dikatakan tidak efisien.

Uji Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan input yang dinyatakan dengan melakukan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dan anggaran belanja langsung. Dimana outcome merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah dicapai setelah kegiatan tersebut. Pada rasio ini akan diketahui hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan target sasaran dan tujuan.

Tabel 4. Rasio Efektivitas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas
2019	1.026.282.900,00	500.000.000,00	205,26%
2020	1.098.788.000,00	850.000.000,00	129,27%

Sumber: Data Diolah

Dari tabel rasio efektivitas diatas, dapat diketahui kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan konsep *Value For Money*. Hasil uji rasio efektivitas menunjukkan bahwa:

- Pada tahun anggaran 2019 rasio efektivitas mencapai 205,26% atau realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 1.026.282.900,00 dari nilai target penerimaan PAD sebesar Rp 500.000.000,00. Rasio ini berada pada rentang diatas 100% yang dapat dikatakan sangat efektif.
- Pada tahun anggaran 2020 rasio efektivitas mencapai 129,27% atau

realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 1.098.788.000,00 dari nilai target penerimaan PAD sebesar Rp 850.000.000,00. Rasio ini berada pada rentang diatas 100% yang dikatakan sangat efektif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada uji rasio yang telah dijelaskan di atas, kinerja keuangan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 - 2020 berdasarkan analisis rasio dengan konsep *Value For Money* sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio

No.	Uraian	2019	2020	Rata-Rata Rasio	Kriteria
1.	Rasio Ekonomis	96,21%	97,41%	96,81%	Kurang Ekonomis
2.	Rasio Efisiensi	7545,47%	4130,72%	5838,10%	Tidak Efisien
3.	Rasio Efektivitas	205,26%	129,27%	167,26%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 5 diketahui bahwa rasio ekonomis dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dikatakan kurang ekonomis karena dalam realisasi anggaran hampir mencapai seluruh penggunaan anggaran yang ditetapkan. Sehingga tidak adanya *spending less*, dimana *spending less* diharapkan dapat terjadi dengan

penggunaan anggaran pada harga terendah pasar yang kemudian dapat terciptanya penghematan anggaran. Meskipun pada rasio ekonomis dikatakan kurang ekonomis, tetapi setidaknya dinas telah melakukan sedikit penghematan terhadap penggunaan anggaran belanja, dimana realisasi anggaran lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan uji rasio efisiensi dapat dikatakan tidak efisien karena dalam penggunaan anggaran belanja untuk mencapai hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD dinas. Akan tetapi, dalam hal ini dinas telah mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi dinas untuk memperoleh PAD. Hal ini dikarenakan PAD yang dihasilkan dinas adalah jenis investasi jangka panjang. Dimana anggaran belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas setiap tahunnya terus dikeluarkan menyesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan dinas, sedangkan hasil dari program dan kegiatan tersebut tidak dapat langsung dirasakan pada tahun berjalan.

Selain itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah instansi pemerintah yang potensinya berada pada sektor perkebunan dan peternakan yang mana untuk mencapai hasil perkebunan diperlukan jangka waktu untuk sampai pada masa panen dan juga hasil panen dapat dipengaruhi oleh musim dan iklim daerah. Hasil panen yang diperoleh petani untuk kemudian diolah atau diproduksi kedalam suatu produk yang dapat diperjualbelikan untuk keperluan industri dan perdagangan (ekspor) menyebabkan penerimaan PAD untuk hasil panen tersebut tidak masuk kedalam PAD Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, melainkan masuk kedalam PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan proses produksi tersebut. Hal ini yang menyebabkan PAD Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dari realisasi anggaran belanja yang dikeluarkan dinas.

Pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 Dinas Perkebunan dan

Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan uji rasio efektivitas dapat dikatakan sangat efektif karena realisasi penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan adanya *spending wisely* dalam pencapaian tujuan yang dilakukan oleh dinas. Dimana terdapat kontribusi *output* dalam mencapai tujuan, target dan sasaran yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 dapat dikatakan kurang ekonomis karena berada pada rentang rasio 90%-100%. Hal ini dipicu dengan harga barang yang tinggi sebanding dengan kualitas terbaik dengan harga pasar yang rendah sangat kecil, sehingga dinas harus mengeluarkan biaya-biaya lebih. Namun, dinas telah berusaha untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran belanja, dimana realisasi anggaran belanja lebih kecil dibandingkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- b. Kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 dapat dikatakan tidak efisien karena realisasi anggaran belanja langsung terhadap pelaksanaan kegiatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio ini berada pada rentang lebih dari 100%.
- c. Kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020 dapat dikatakan sangat efektif karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas telah mencapai target sasaran

dan tujuan, dimana realisasi penerimaan PAD lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan PAD. Rasio ini berada pada rentang lebih dari 100%.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat peneliti mengenai kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, maka peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat digunakan dan dijadikan pertimbangan oleh Dinas dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja keuangan, sebagai berikut:

- a. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang harus lebih hemat dan tepat sasaran agar tidak terjadi pemborosan dan pengeluaran biaya yang tidak produktif.
- b. Pengelolaan biaya terhadap belanja barang dan jasa, jika dapat membeli atau memperoleh barang dengan harga terendah pasar dan kualitas terbaik, agar dapat dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan pentingnya pelaksanaan survey harga sebelum adanya pembelian barang dan jasa, sehingga dapat terciptanya penghematan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham, 2012, *Analisa Laporan Keuangan*, Cetakan Ke-2, Alfabeta, Bandung.
- Halim, Abdul, 2012, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2019, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Universitas Terbuka, Banten.

Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.

Mulyadi, 2007, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.

Munawir, 2011, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kesebelas. Liberty, Yogyakarta.

Sartono, Agus, 2011, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta.

Sujarweni V. Wiratna, 2015, *Akuntansi Sektor Publik*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.